

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, December 2005).
- Angga Anjaya, “*Konsep Lembaga Negara (Studi Komperatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).
- Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta : KHRN, 2005.
- Ashiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: setjen dan kepaniteraan MKRI.
- Krisnayudha, Backy, *Pancasila dan Undang-Undang*, Surabaya: PMG
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : 2010
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syaruf Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008).
- Darul, Chatrina, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurdi, Fajrulrahman, *Hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta : kencana, 2019.
- Handayani, Febry, *Tindak Pidana Korupsi*, suska Press : Pekanbaru 2011
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai Komisi*

Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur sipil Negara, Pasal 4

Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 6 tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15

Pope, Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 177.

Situmorang, Jubir, Politik ketatanegaraan Dalam Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).

KBBI : memiliki makna bertele-tele, atau memperlambat suatu pekerjaan dilandaskan pada pekerjaan dan proses, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pembangunan Hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan ketentuan yang telah ada termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Mohd. Rizaldi, Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai lembaga Independen, Jurnal penelitian Universitas Kuningan, Volume 12, No. 01 (2021), hal . 27

Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rokesorosin, 1996.

Huda, Ni`matul, "Hukum Tata Negara Indonesia", (Jakarta; Rajawali Pers, 2012).

Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahasa Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 53-56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pasal 53-56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gerung, Rocky, Etos Politik KPK dalam buku Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi (Jakarta: Kompas, 2009).

Rubianti, Fitri, Kedudukan KPK Menurut UUD 1945 dan Sistem Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Rajawali Pers, 1996. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Johan, Teuku Saiful Bahri, "Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),

Tim Penyusun Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Penulisan Skripsi 2021, Banten : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waluyo, Bambang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Sari, Yopa Puspita, "Kedudukan KPK Dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam", Al-Imarah : Jurnal Penelitian Islam dan Politik, Vol. 4, No. 2, 2019

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawi, Kepemimpinan Islam (kebijakan-kebijakan Politik rasulullah sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan), (banda Aceh; Penerbit PeNA, 2016).

Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

### **Jurnal**

Ahmad Rifa`i, Implikasi Kaidah Fikih Tasriful Imam `Ala Ra`iyati Manuutun Bil Masalah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat, *Al-Maslahah : Jurnal Hukum Pada Pranata Sosial*.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004). Di akses <https://pshk.or.id/blog-id/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik-dalam-revisi-undang-undang-tentang-komisi-pemberantasan-korupsi/> dikutip pada Tanggal 13 Maret 2022 Jam 21.00 WIB

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: penerbit Kanisius, 2014), hlm 183. Di akses <https://pshk.or.id/blog-id/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik-dalam-revisi-undang-undang-tentang-komisi-pemberantasan-korupsi/> dikutip pada Tanggal 13 Maret 2022 Jam 21.00 WIB

Surpres Revisi UU KPK: Antara Kejanggalan dan Konspirasi, Di akses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912134311-12-429901/surpres-revisi-uu-kpk-antara-kejanggalan-dan-konspirasi>, akses 20 maret 2022.

### **Website**

<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundag-undangan/>,dikutip pada tanggal 13 maret 2022 pada pukul 20.42 WIB

<https://nasional.kompas.com/negara-terkorup-menurut-perc/> di akses pada 24 maret 2022.

<http://www.transparency.org/research/cpi/overview/> diakses pada 24 maret 2022

[https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/struktur-organisasi,](https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/struktur-organisasi) diakses pada 22 april 2022